

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang pembangunannya terus mengalami perkembangan yang diwujudkan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimana terdapat banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yang datang dari berbagai aspek. Salah satu hambatannya adalah kesalahan dalam kebijakan pembangunan Indonesia selama ini orientasi pembangunan yang selalu tertumpu pada daerah tertentu. Pembangunan disuatu daerah sangat erat kaitannya dengan aktivitas pendukung yang dapat memudahkan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan. Keseluruhan kegiatan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi maupun sosial.

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu negara diperlukan kapasitas angkutan yang optimum. Namun perlu diperhatikan bahwa penentuan kapasitas termasuk dan tingkat investasi tidak merupakan hal yang mudah.

Morlok (1998) mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat kepemilikan sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mencakup kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang, pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan permintaan yang perlu

dihantarkan menuju wilayah atau daerah lain diperlukan sarana prasarana transportasi. Sarana prasarana transportasi yang memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum atau pengangkutan lainnya. Angkutan umum akan melayani pergerakan penumpang dan barang dari satu daerah ke daerah lain, sedangkan untuk prasarana transportasi yaitu kondisi jalan.

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi dalam suatu wilayah perlu ditata dan dikembangkan dalam suatu sistem terpadu yang meliputi angkutan darat, udara dan laut. Sehingga perencanaan wilayah, pedesaan dan kota serta masalah transportasi tidak terabaikan. Tapi justru masalah ini menjadi sangat penting, dikarenakan menyangkut hubungan antar daerah.

Adisasmita (2012) mengartikan mobilitas penduduk sebagai suatu kondisi dimana penduduk tidak lagi terkungkung dalam suatu wilayah, melainkan memiliki banyak peluang untuk melakukan perjalanan keluar daerahnya. Dalam masyarakat yang masih primitif, mobilitas akan sangat terbatas. Sebaliknya mobilitas pada masyarakat yang lebih modern akan lebih tinggi dan sangat luas (dalam perjalanan jarak jauh, misal antar negara atau benua). Perjalanan ini dimungkinkan karena tersediannya fasilitas transportasi yang cukup, sehingga perjalanan dapat berlangsung dengan beberapa maksud, seperti untuk perjalanan bisnis, perjalanan dinas perjalanan urusan keluarga, perjalanan liburan, dan perjalanan wisata.

Menurut Tri Bastuti 2010 (dalam Suwandi 2015) dengan adanya bangunan prasarana transportasi berdampak pada: (1) mobilitas masyarakat meningkat, waktu tempuh dan biaya transportasi ke beberapa fasilitas (perekonomian, pemerintahan, kesehatan dan pendidikan) menurun, (2) kesempatan kerja semakin

banyak, (3) pemasaran hasil pertanian maupun hasil industri semakin mudah, (4) pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat baik secara absolut maupun riil, (5) secara tidak langsung berdampak positif terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat, (6) agar pembangunan prasarana transportasi hal ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sasaran, maka sebaiknya prasarana yang dibangun, ditingkatkan dan dikembangkan oleh program pembangunan pemerintah daerah, sehingga akan bermanfaat dalam jangka panjang, dan mengurangi beban masyarakat untuk pemeliharannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk itu terjadi apabila terdapat perbedaan nilai kefaedahan antara dua wilayah.

Kualitas prasarana jalan yang baik merupakan modal utama yang sangat berperan penting untuk mendukung pembangunan daerah dalam melayani mobilitas penduduk dan pendistribusian barang. Di samping itu jaringan jalan juga dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antar daerah dan mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antar daerah, kota serta pedesaan. Kecamatan Tanjung Balai merupakan daerah yang memiliki topografi datar dan wilayahnya terbagi atas perairan dan daratan. Sebagai daerah yang memiliki aktivitas heterogen selayaknya prasarana dan sarana transportasi harus sudah memadai untuk kelancaran aktivitas masyarakat. Prasarana jalan merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, begitu juga masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai yang sangat membutuhkan prasarana jalan agar mendukung aktivitas masyarakat yang beraneka ragam baik itu di dalam pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Kecamatan Tanjung Balai merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Asahan. Kecamatan ini terdiri dari 8 desa yaitu: Desa Asahan Mati,

Desa Bagan Asahan Baru, Desa Bagan Asahan Pekan, Desa Bagan Asahan, Desa Kapias Batu VIII, Desa Pematang Sungai Baru, Desa Sei Apung Jaya dan Desa Sei Apung. Kecamatan ini memiliki luas 60,20 km² dengan jumlah penduduk 36.880 jiwa.

Melihat kondisi keadaan prasarana dan sarana transportasi di salah satu desa, yaitu desa Pematang Sei Baru di Kecamatan Tanjung Balai kurang diperhatikan oleh pemerintah, bisa dilihat dari keadaan jalan yang rusak ringan hingga rusak berat. Di samping itu keadaan sarana transportasi juga kurang memadai, desa Pematang Sei Baru ialah salah satu desa yang belum mempunyai transportasi umum, sehingga berdampak negatif pada mobilitas masyarakatnya. Masyarakat desa yang ada di Kecamatan Tanjung Balai pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani kelapa dan nelayan tentunya untuk memasarkan hasil alam mereka perlu didukung oleh prasarana dan sarana transportasi yang baik. Seperti kita ketahui prasarana dan sarana transportasi merupakan kebutuhan utama dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Kualitas sarana dan prasarana jalan dan sarana angkutan sangat mempengaruhi tingkat mobilitas penduduk, mobilitas barang dan perkembangan suatu daerah dalam hubungannya dengan daerah lain. Kualitas prasarana jalan dan sarana angkutan sangat mempengaruhi mobilitas penduduk, baik penduduk pedesaan maupun penduduk perkotaan karena dapat mendukung atau menghambat mobilitas penduduk. Apabila kualitas sarana jalan dan sarana angkutannya baik maka akan dapat mendukung pergerakan penduduk dan distribusi barang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

Sebagai daerah yang sebagian besarnya merupakan perkebunan kelapa masyarakat dan perairan, daerah Kecamatan Tanjung Balai sangat membutuhkan kelancaran prasarana dan sarana transportasi darat guna mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya khususnya dalam mempermudah pemasaran hasil alam yang mereka miliki.

B. Identifikasi Masalah

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian suatu wilayah maka mengakibatkan mobilitas masyarakat yang harus didukung oleh prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Demikian juga dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Balai yang aktivitasnya heterogen sehingga membutuhkan prasarana dan sarana transportasi yang tercukupi. Prasarana transportasi di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Balai masih cukup rendah bisa dilihat dari terdapat jalan yang rusak di jalan utama maupun di jalan desanya. Begitu juga sarana transportasi di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Balai juga masih sangat minim, dan sebagian desa tidak memiliki angkutan transportasi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada prasarana meliputi: panjang jalan, lebar, kualitas jalan dan sarana meliputi sarana angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang, becak motor, dan angkutan pribadi, serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kondisi prasarana dan sarana di Kecamatan Tanjung Balai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kondisi prasarana dan sarana transportasi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kondisi prasarana dan sarana transportasi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi prasarana dan sarana transportasi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
2. Upaya masyarakat dalam mengatasi kondisi prasarana dan sarana transportasi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan peneliti ini adalah:

1. Bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk dapat memperhatikan prasarana dan sarana transportasi diberbagai wilayah khususnya di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

2. Apabila perbaikan prasarana dan sarana transportasi dapat terealisasi, dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
3. Sebagai khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti.

